

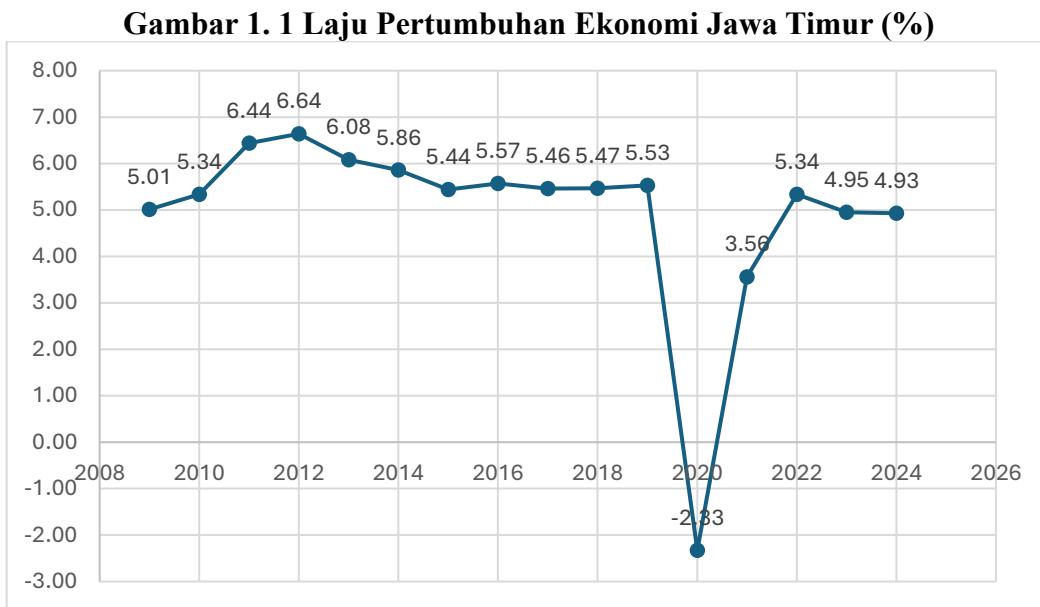
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan indikator sebuah keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Afif & Ciptawaty, 2020). Berbagai faktor struktural, seperti ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, turut memengaruhi laju pertumbuhan nasional. Perencanaan pembangunan tidak hanya dituntut untuk mengejar angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat ekonomi di seluruh wilayah agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai penanda vital pembangunan berkelanjutan, namun tidak semua daerah menunjukkan kinerja serupa, dimana sebagian wilayah justru tampil dominan dan memainkan peran strategis dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Provinsi Jawa Timur konsisten sebagai kontributor PDB nasional terbesar kedua setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi sebesar 14,22% dari data BPS tahun 2024. Meski pertumbuhannya fluktuatif sejak 2009 hingga 2024, kinerja ekonominya relatif stabil. Kontraksi tajam terjadi pada 2020 akibat pandemi COVID-19, namun pemulihan cepat menunjukkan resiliensi ekonomi. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,96% bahkan melampaui nasional yang hanya 4,75% pada periode yang sama. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersaji pada gambar 1.1.



Sumber : BPS, 2024 (Data Diolah)

Gambar 1.1 di atas menggambarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun capaian tersebut tidak serta merta mencerminkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur. Menurut Williamson dalam Sjafrizal (2012), indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan tersebut adalah Indeks Williamson (IW). Kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, nilai Indeks Williamson Jawa Timur mencapai 0,97, yang menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah berada pada tingkat yang tinggi ($IW > 0,5$), menandakan adanya disparitas signifikan dalam distribusi hasil pembangunan antar daerah di provinsi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan keberhasilan pembangunan jika pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan pemerataan antarwilayah, hasil pembangunan justru dapat menghasilkan ketimpangan sosial

dan ekonomi yang signifikan. Model pertumbuhan ekonomi yang hanya mengandalkan investasi modal dan akumulasi pendapatan tanpa memperhatikan distribusi kekayaan dengan merata dapat meningkatkan investasi di wilayah yang sudah makmur, sementara wilayah lain tertinggal, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif (Panzera & Postiglione, 2022).

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal seberapa cepat sebuah daerah berkembang, tapi juga bagaimana pertumbuhan itu menyebar ke sekitarnya (Hasna & Qibti, 2020). Pertumbuhan ekonomi idealnya menjadi instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun dalam praktiknya, tidak jarang pertumbuhan justru memperlebar kesenjangan, baik antar kelompok sosial maupun antar wilayah (Ibrahim, 2017). Ketika sebagian wilayah tumbuh pesat karena akses terhadap infrastruktur, investasi, dan konsentrasi industri, daerah lainnya tertinggal tanpa dukungan yang memadai. Akibatnya, ketimpangan semakin melebar, menciptakan jurang kesejahteraan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pinggiran (Putra & Salim, 2022).

Penelitian Sakti dan Maudita (Sakti & Maudita, 2022) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami divergensi spasial, yang berarti bahwa daerah kaya terus tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah miskin, sehingga memperparah ketimpangan antar wilayah. Sejak 2008, industrialisasi cenderung terkonsentrasi hanya di beberapa daerah, yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Konsep teori konvergensi ekonomi menyatakan bahwa daerah dengan pendapatan rendah seharusnya tumbuh lebih cepat daripada daerah

kaya, namun dalam kenyataannya, proses tersebut tidak terjadi secara alami di Jawa Timur.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur adalah adanya konsentrasi atau potensi aglomerasi yang terpusat di wilayah tertentu. Sejumlah literatur juga dibuktikan oleh Wahyuni & Satriawan (2023), Tiara & Hendarto (2023), dan Wulandari (2021), yang menunjukkan bahwa adanya potensi aglomerasi industri yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Wilayah dengan konsentrasi industri cenderung menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, infrastruktur yang lebih baik, dan akses peluang yang lebih luas dibandingkan daerah lainnya (Putra & Salim, 2022).

Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu dapat menciptakan efek "penyedotan" sumber daya baik tenaga kerja, modal, maupun infrastruktur dari wilayah sekitarnya (Widiatri & Dharmawan, 2015). Ketika pusat pertumbuhan seperti wilayah industri menyerap surplus ekonomi dari daerah pinggiran, maka wilayah-wilayah di luar simpul industri tidak hanya kehilangan sumber daya strategis, tetapi juga mengalami kesenjangan dalam akses terhadap investasi dan teknologi. Efek aglomerasi yang menyedot sumber daya dari wilayah sekitarnya menjadikan daerah-daerah di luar simpul industri kehilangan akses modal dan infrastruktur, sehingga memperlemah daya saing mereka dalam jangka panjang.

Pendekatan teoretis lainnya mengingatkan bahwa kedekatan geografis tidak selalu berujung pada sinergi. Konsentrasi ekonomi di suatu wilayah dapat menciptakan keuntungan aglomerasi bagi wilayah tertentu, namun secara

bersamaan memperkuat ketimpangan antar wilayah melalui *backwash effects*. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh teori *cumulative causation* (Myrdal), yang menegaskan bahwa wilayah yang lebih unggul cenderung terus menarik sumber daya dan peluang ekonomi dari wilayah yang lebih lemah, sehingga terjadi pertumbuhan yang bersifat tidak merata.

Alih-alih mendorong pemerataan, investasi dan pembangunan infrastruktur justru terpusat di wilayah yang telah lebih dahulu berkembang atau memiliki akses yang lebih baik. Investor cenderung memilih lokasi yang sudah mapan dari sisi fasilitas pendukung, logistik, dan koneksi pasar. Akibatnya, wilayah lain yang belum memiliki keunggulan tersebut menjadi terpinggirkan, tidak mampu menarik investasi, dan mengalami stagnasi ekonomi. Adanya keterbatasan sinergi antar wilayah industri, sehingga relasi yang terbentuk cenderung bersifat fragmentaris dan saling bersaing, alih-alih membangun kolaborasi yang saling memperkuat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di satu wilayah belum tentu mendorong pertumbuhan wilayah lainnya, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan regional yang makin lebar.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk ketimpangan spasial, tetapi juga dalam melemahnya kohesi ekonomi regional. Ketika hanya satu atau dua wilayah mendominasi aliran investasi dan pembangunan, wilayah lain akan kesulitan mengembangkan potensi lokalnya, bahkan bisa kehilangan sumber daya manusia berkualitas akibat migrasi ke pusat industri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya membangun wilayah industri sebagai entitas

tunggal, tetapi juga merancang kebijakan pengembangan wilayah secara terintegrasi, berbasis jaringan dan keterhubungan antarwilayah.

Meskipun indikasi aglomerasi industri turut memperbesar ketimpangan antarwilayah, tidak dapat disangkal bahwa sektor industri juga memainkan peran krusial dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Industri menjadi salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor Industri berkontribusi 31,29% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada tahun 2024. Kontribusi ini mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur, berdasarkan data triwulan IV-2024.

Industri telah lama dipandang sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Konsentrasi kegiatan industri di suatu lokasi memicu peningkatan kapasitas produksi, produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan infrastruktur, yang kesemuanya berkontribusi pada akselerasi ekonomi regional. Peningkatan aktivitas ekonomi juga mendorong migrasi tenaga kerja ke wilayah dengan konsentrasi industri, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas SDM melalui persaingan dan kebutuhan akan keterampilan yang lebih tinggi (Novirin, 2021).

Konsentrasi industri yang berlebihan pada titik tertentu juga berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan basis industri kuat cenderung mengalami akselerasi pembangunan yang jauh lebih cepat dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor tradisional. Hal ini menciptakan kesenjangan spasial, baik dalam hal distribusi pendapatan maupun

kesempatan kerja. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis industri tidak selalu bersifat inklusif, melainkan berpotensi menghasilkan polarisasi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan.

Selain itu, interaksi antarwilayah industri menjadi penting untuk dikaji. Pertumbuhan industri di suatu daerah tidak terjadi secara terisolasi, melainkan memiliki efek limpahan (*spillover effect*) terhadap daerah sekitarnya. Efek ini dapat bersifat positif, misalnya peningkatan permintaan bahan baku, jasa logistik, atau tenaga kerja. Namun, tidak menutup kemungkinan pula terjadi efek negatif seperti kompetisi yang menekan perkembangan daerah dengan kapasitas industri lebih kecil. Kondisi ini semakin relevan untuk ditinjau dalam konteks Jawa Timur yang memiliki struktur ekonomi berbasis industri dengan kontribusi wilayah yang tidak merata.

Implikasi dari konsentrasi dan dominasi sektor tertentu dapat terlihat lebih jelas apabila ditinjau melalui kontribusi ekonomi masing-masing wilayah di Jawa Timur. Kontribusi tersebut dapat diidentifikasi melalui besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) masing-masing wilayah, yang mencerminkan nilai riil output ekonomi dan memungkinkan perbandingan antar daerah secara lebih objektif tanpa terpengaruh oleh inflasi. Pola distribusi PDRB antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah yang mendominasi pembentukan ekonomi provinsi, sementara sebagian besar daerah lainnya masih memberikan kontribusi yang relatif kecil. Kontribusi terhadap total PDRB Jawa Timur tersaji pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Kontribusi terhadap Total PDRB Jawa Timur (%)

No	Kab/Kota	2024
1	Kota Surabaya	24.34
2	Kabupaten Sidoarjo	9.35
3	Kabupaten Pasuruan	6.35
4	Kabupaten Gresik	5.94
5	Kota Kediri	5.32
6	Kabupaten Malang	4.36
7	Kabupaten Mojokerto	3.56
8	Kabupaten Banyuwangi	3.43
9	Kabupaten Jember	3.24
10	Kabupaten Bojonegoro	3.21
11	Kota Malang	3.15
12	Kabupaten Tuban	2.74
13	Kabupaten Kediri	1.72
14	Kabupaten Jombang	1.7
15	Kabupaten Lamongan	1.64
16	Kabupaten Tulungagung	1.61
17	Kabupaten Blitar	1.51
18	Kabupaten Probolinggo	1.44
19	Kabupaten Sumenep	1.42
20	Kabupaten Lumajang	1.36
21	Kabupaten Nganjuk	1.14
22	Kabupaten Bangkalan	0.91
23	Kabupaten Ponorogo	0.85
24	Kabupaten Situbondo	0.85
25	Kabupaten Bondowoso	0.84
26	Kabupaten Ngawi	0.82
27	Kabupaten Madiun	0.81
28	Kabupaten Sampang	0.78
29	Kabupaten Trenggalek	0.77
30	Kabupaten Magetan	0.77
31	Kabupaten Pamekasan	0.71
32	Kota Batu	0.7
33	Kabupaten Pacitan	0.65
34	Kota Madiun	0.59
35	Kota Probolinggo	0.48
36	Kota Pasuruan	0.35
37	Kota Blitar	0.29
38	Kota Mojokerto	0.27

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.1 di atas, kontribusi terhadap total PDRB Jawa Timur pada lima wilayah yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Kediri merupakan penyumbang terbesar terhadap total output ekonomi provinsi dengan kontribusi terbesar berturut-turut adalah Kota Surabaya (24,34%), Kabupaten Sidoarjo (9,35%), Kabupaten Pasuruan (6,35%), Kabupaten Gresik (5,94%), dan Kota Kediri (5,32%). Wilayah industri besar seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pasuruan memiliki kontribusi signifikan. Masing-masing wilayah ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama di sektor industri.

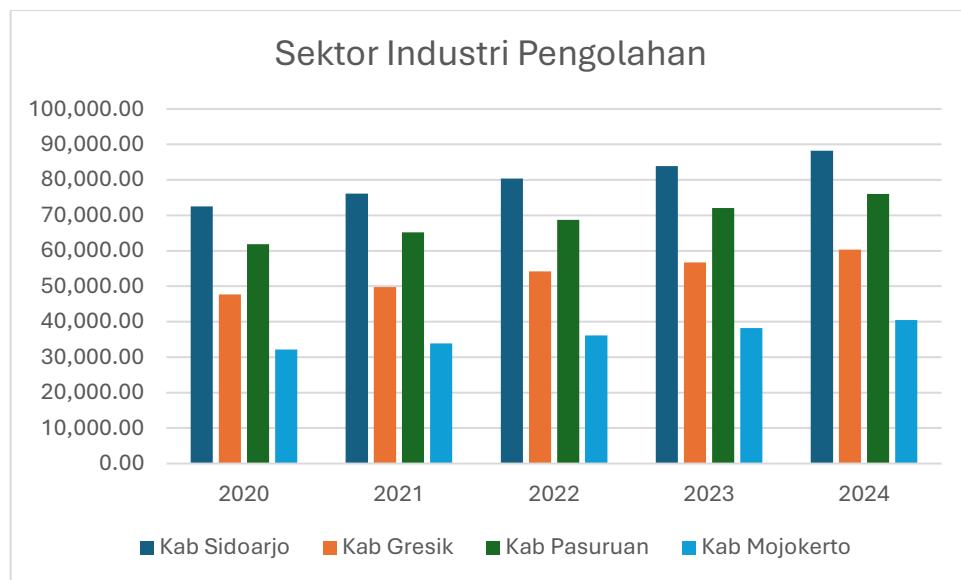
Namun pemilihan wilayah penelitian difokuskan pada empat pusat industri di wilayah tengah Jawa Timur, dengan mengecualikan Kota Surabaya. Kota Surabaya dikecualikan karena skala ekonominya yang sangat dominan berpotensi menjadi outlier dan menyebabkan ketidakhomogenan dalam analisis sektor industri antarwilayah. Dengan pertimbangan kontribusi sektor industri yang signifikan dan keterkaitan spasial yang kuat, sebagaimana tercermin dari hasil analisis limpahan pertumbuhan ekonomi (Wibisono & Kuncoro, 2015). Keempat wilayah tersebut yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya menjadi kontributor utama terhadap pembentukan PDRB Jawa Timur, keempat wilayah itu juga berperan sebagai pusat aktivitas industri yang saling terhubung melalui rantai pasok, distribusi logistik, serta mobilitas tenaga kerja.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), wilayah pusat industri di Jawa Timur seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan

Kabupaten Mojokerto mencatatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bervariasi. Kabupaten Sidoarjo tetap mendominasi secara signifikan, sementara. Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Gambar 1.2 di bawah ini menggambarkan grafik tren pertumbuhan PDRB ADHK empat wilayah wilayah industri tersebut:

Gambar 1.2 Tren Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK dalam Miliar
Sumber : BPS, 2024 (Data diolah)



Berdasarkan gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa meskipun tren pertumbuhan tidak mengalami fluktuasi tajam, namun pola yang relatif stabil ini justru menunjukkan adanya konsistensi kontribusi ekonomi dari masing-masing daerah terhadap perekonomian Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo sebagai yang terkenal sebagai industri padat karya dan pusat pertumbuhan industri, tetap mempertahankan posisi dominannya. Di sisi lain, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto yang berbatasan langsung dengan Kabupaten

Sidoarjo, menunjukkan peran penting sebagai wilayah pendukung, baik dalam bentuk aktivitas industri, tenaga kerja, dan jaringan distribusi. Kedekatan spasial dan keterhubungan aktivitas ekonomi antarwilayah ini memperkuat dugaan adanya interaksi ekonomi yang bersifat timbal balik atau resiprokal.

Pembangunan wilayah industri kerap dianggap sebagai strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam perspektif teori *growth pole* yang diperkenalkan oleh François Perroux, pembangunan yang terpusat di suatu wilayah tertentu (*growth pole*) berpotensi menciptakan efek penyebaran (*spread effects*) ke wilayah sekitarnya melalui keterkaitan aktivitas ekonomi, transfer teknologi, dan peningkatan permintaan antarsektor. Ketika beberapa wilayah industri tumbuh dalam kedekatan geografis, terbuka peluang terjadinya keterkaitan ekonomi regional yang saling menguatkan, baik melalui aliran tenaga kerja, input-output industri, maupun penggunaan infrastruktur bersama. Hal ini sejalan dengan konsep *regional economic cohesion*, yaitu kondisi di mana wilayah-wilayah dalam suatu wilayah berkembang secara relatif seimbang dan saling mendukung satu sama lain.

Dalam berbagai kebijakan pembangunan industri, pemerintah kerap mengasumsikan bahwa wilayah industri yang dibangun secara berdekatan akan saling mendukung dan mendorong pertumbuhan bersama. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa kedekatan geografis antar wilayah industri memungkinkan terbentuknya hubungan timbal balik melalui aliran tenaga kerja, input-output produksi, serta pemanfaatan infrastruktur bersama. Dengan kata lain, wilayah-wilayah tersebut diharapkan membentuk ekosistem industri yang saling

memperkuat. Wilayah industri yang saling terhubung melalui jaringan logistik dan rantai pasok dapat menciptakan efek sinergi, yang mendorong pertumbuhan bersama secara lebih terintegrasi. Namun di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, kompetisi antar wilayah industri terutama dalam menarik investasi atau tenaga kerja bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menciptakan ketimpangan baru antar wilayah industri itu sendiri (Rizal et al., 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *spillover* pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Studi oleh (Wibisono & Kuncoro, 2015a) menunjukkan bahwa wilayah seperti Kota Surabaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya melalui aktivitas perdagangan dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan temuan (Ifa et al., 2023a) yang mencatat pola klaster spasial pada wilayah dengan pertumbuhan tinggi, mengindikasikan adanya potensi keterkaitan antar wilayah industri. Sementara itu, (Sakti & Maudita, 2022) menekankan bahwa konsentrasi industri justru dapat memperbesar ketimpangan, karena pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan tidak menyebar merata ke daerah lain.

Kendati sebagian besar kajian *spillover* pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menekankan pada aspek spasial dan keterkaitannya dengan wilayah pinggiran, studi ini berfokus pada dinamika hubungan antarwilayah industri utama yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan membatasi cakupan pada empat wilayah industri terbesar.

Ketika suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sering kali muncul dugaan bahwa dinamika tersebut dapat menimbulkan efek ekonomi

terhadap wilayah lain di sekitarnya. Namun pada saat yang sama, tidak tertutup kemungkinan bahwa wilayah-wilayah sekitar juga memberikan kontribusi balik terhadap wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut. Fenomena ini menciptakan hubungan dua arah yang kompleks dan saling memengaruhi, sehingga tidak cukup hanya dianalisis dengan pendekatan kausal satu arah. Dalam situasi seperti ini, penggunaan metode analisis yang mampu mengatasi persoalan endogenitas menjadi sangat penting.

Untuk mengatasi masalah endogenitas maka penelitian ini menggunakan pendekatan Two-Stage Least Squares (TSLS) untuk mengidentifikasi hubungan kausal yang lebih valid. Dengan metode ini, dinamika timbal balik antar wilayah dapat ditangkap secara lebih objektif, serta meminimalkan bias estimasi akibat pengaruh dua arah yang melekat dalam interaksi ekonomi regional. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol potensi bias yang muncul akibat hubungan dua arah dengan memanfaatkan variabel instrumental yang memenuhi asumsi relevansi dan eksogenitas.

Atas dasar kerangka konseptual dan metodologis tersebut, penelitian ini disusun dengan judul **“Analisis *Spillover Effect* Antarwilayah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri di Wilayah Gerbangkertasusila - 4”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan timbal balik pertumbuhan sektor industri antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik?
2. Apakah terdapat hubungan timbal balik pertumbuhan sektor industri antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan?
3. Apakah terdapat hubungan timbal balik pertumbuhan sektor industri antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan timbal balik pertumbuhan sektor industri Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan balik pertumbuhan sektor industri Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan timbal balik pertumbuhan sektor industri antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendukung integrasi pertumbuhan antar wilayah industri di Jawa Timur.
2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi hubungan resiprokal antar wilayah industri sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi pembangunan wilayah industri yang lebih sinergis dan berkelanjutan di tingkat provinsi maupun nasional.

3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antar wilayah industri utama yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto dalam konteks pertumbuhan sektor industri dengan metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu *Two-Stage Least Squares* (TSLS).